



STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN APBD

RANU MIHARDJA
KAPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEREMIMPINAN
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

DISAMPAIKAN KEPADA PARA KEPALA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
BOGOR, 26 SEPTEMBER 2019

NURANI ADHIYAKSA

PRAKTEK KORUPSI TERUS TERJADI DAN MELUAS



UPAYA PEMERINTAH MELALUI PENINDAKAN,
PENCEGAHAN MAUPUN REFORMASI BIROKRASI
DIBERBAGAI SEKTOR



TERPOLA



SISTEMATIS



KUALITAS/KN

KORUPSI



SUDAH MERAMBAH KESELURUH STRUKTUR
MASYARAKAT DAN SEMUA BIDANG KEHIDUPAN



OKNUM PN



OKNUM PENGUSAHA



OKNUM POLITISI

A. PENDAPATAN DAERAH

1

- PAJAK TONTOTAN, RETRIBUSI (TERMINAL, PASAR DAN WISATA) TIDAK DISETOR KE KAS DAERAH

2

- PENYETORAN PAJAK (HIBURAN, RESTORAN, HOTEL) BUKAN REALISASI PENERIMAAN, TETAPI DITETAPKAN ATAS NEGOSIASI DG PETUGAS TERKAIT

3

- PAJAK REKLAME DISETORKAN LEBIH KECIL DARI YANG SEHARUSNYA

4

- RETRIBUSI IMB DISETORKAN BUKAN ATAS PENERIMAAN SEBENARNYA TETAPI ATAS NEGOSIASI TARIF KELAS BANGUNAN DAN VOLUME YANG LEBIH RENDAH

5

- PENJUALAN ASET TANPA PERSETUJUAN PEJABAT YANG BERWENANG DAN HARGA JUAL LEBIH KECIL DRPD HARGA SEBENARNYA

PENDAPATAN DAERAH

6

- PELAKSANAAN TUKAR BANGUNAN/RUISLAG YANG TIDAK BENAR

7

- PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK TUJUAN PRIBADI

8

- PENJUALAN ASET MILIK DAERAH TNPA LELANG , MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DG HARGA MURAH

B. ANGGARAN BELANJA PEMDA

1

- PENGELUARAN RUTIN

2

- PENGELUARAN PEMBANGUNAN

3

- PENGGUNAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI
PERUNTUKANNYA

C. MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN di PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERINDIKASI KORUPSI



1

2

3

INTERVENSI PROSES PENGADAAN

PENGUSAHA MNGGUNAKAN PENGARUH PEJABAT PUSAT UTK MEMBUJUK KDH/ PD INTERVENSI PROSES PENGADAAN (MENANG), HARGA/NILAI KONTRAK TINGGI

MINTA JASA PROYEK

MINTA UANG JASA DIBAYAR DIMUKA 3-5% KEPADA PEMENANG TENDER

RUISLAG MARK DOWN

PENGUSAHA, PJBT EKSEKUTIF/LEGISLATIF DAERAH SEPAKAT MELAKUKAN RUISLAG MARK DOWN ASET PEMDA MARK UP (PENGANTI)



MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN di PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERINDIKASI KORUPSI

4

PENGUSAHA PENGARUHI
KDH/PEJABAT PEMDA

*REKANAN TERTENTU DIMENANGKAN,
HARGA DI MARK UP, SELISIHNYA
DIBAGI-BAGI*

5

SPESIFIKASI KE MERK
TERTENTU

*MENGARAH KE MERK TERTENTU
MARK UP, SELISIHNYA DIBAGI-BAGI*

6

BUKTI PENGELUARAN
YG TDAK
BENAR/FIKTIF

*KDH/PD PERINTAH STAF GUNAKAN
UANG DAERAH UTK PRIBADI/KOLEGA,
BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN GIAT
TDK BENAR ATAU FIKTIF*

MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN di PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERINDIKASI KORUPSI

7

8

9

TERIMA
SUAP/GRATIFIKASI

KDH TERIMA UANG DARI REKANAN DG
MENJANJI AKAH DIBERI PROYEK

REKENING KAS DAERAH
SPECIMEN PRIBADI

DENGAN TUJUAN MEMPERMUDAH
PENCAIRAN DANA TANPA PROSEDUR

IZIN KELOLA SDA TDK
MAMPU SCR TEKNIS

KDH MEMBERIKAN IJIN KELOLA SDA
KPD PERUSAHAAN YG TDK MEMILIKI
KEMAMPUAN TEKNIS



MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN di PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERINDIKASI KORUPSI

10

TERIMA
SUAP/GRATIFIKASI
PERIZINAN

*KDH MENERIMA UANG/BARANG YANG
BERHUNUNGAN DENGAN PERIJINAN
YANG DIKELUARKANNYA*

11

KDH/KEL BELI BRNG
MURAH DIJUAL DG MARK
UP

*KDH/KELUARGA/KELOMPOKNYA BELI
LEBIH DULU BARANG DG HARGA MURAH
DAN DIJUAL KEMBALI KE INSTANSINYA
DG YG SDH DI MARK UP*

12

CICILAN PEJABAT
PAKAI ANGGARAN

*KDH MEMINTA STAFNYA MENCICILKAN
BARANG PRIBADINYA MENGGUNAKAN
ANGGARAN DAERAHNYA*



MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN di PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERINDIKASI KORUPSI

13

SUAP PENGURUSAN
DAU/DAK BEBAN
ANGGARAN

*KDH MEMBERIKAN DANA KE PJBT
TERTENTU DG BEBAN ANGGARAN
DG ALASAN PENGURUSAN DAU/DAK*

14

SUAP PROSES SUSUN
ANGGARAN

*KDH MEMBERIKAN DANA KE DPRD DLM
PROSES SUSUN APBD DAN TERKAIT DG
HAK INTERPELASI YG AKAN DIAJUKAN
OLEH ANGGOTA DPRD*

15

KELUARKAN DANA
UTK PERKARA PRIBADI

*KDH MEMBEBANKAN APBD UNTUK
PERKARA PRIBADI*



KEJAKSAAN RI

Lembaga Pemerintahan
Kekuasaan Negara di
Bidang Penuntutan

Lembaga Penegak
Hukum

Terlibat sepenuhnya dalam
proses pembangunan

**MENJAGA DAN
MENEKAKAN
KEWIBAWAAN
PEMERINTAH DAN NEGARA
SERTA MELINDUNGI
KEPENTINGAN
MASYARAKAT**

**PENEGAKAN HUKUM
REFRESIF**

**MENCIPTAKAN KONDISI
YANG MENDUKUNG
DAN MENGAMANKAN
PEMBANGUNAN**

**PENEGAKAN HUKUM
PREVENTIF**

**Ratifikasi
United Nation Convention
Against Corruption
(UNCAC)
Tahun 2003**



**Diundangkan melalui UU No. 7 Tahun
2006 tentang Pengesahan Konvensi
PBB anti korupsi pada tanggal 18 april
2006**



**Pemberantasan
Korupsi**



Pre emtif



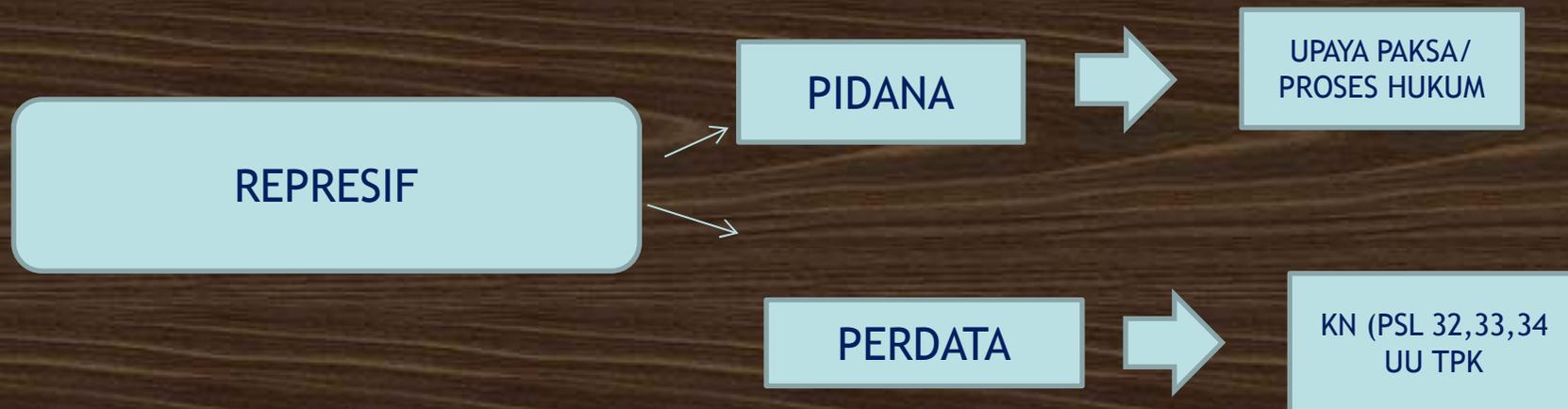
Preventif



Represif



UPAYA YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR



PENANGANAN PERKARA KORUPSI TAHUN 2015, 2016, 2017 DAN TAHUN 2018

POSISI 2015

KEJAKSAAN : 1.622

POLRI : 824

KPK : 99

POSISI 2016

KEJAKSAAN : 1.536

POLRI : 905

KPK : 99

POSISI 2017

KEJAKSAAN : 1.300

POLRI : 788

KPK : DIK 174 TUT 143

POSISI 2018

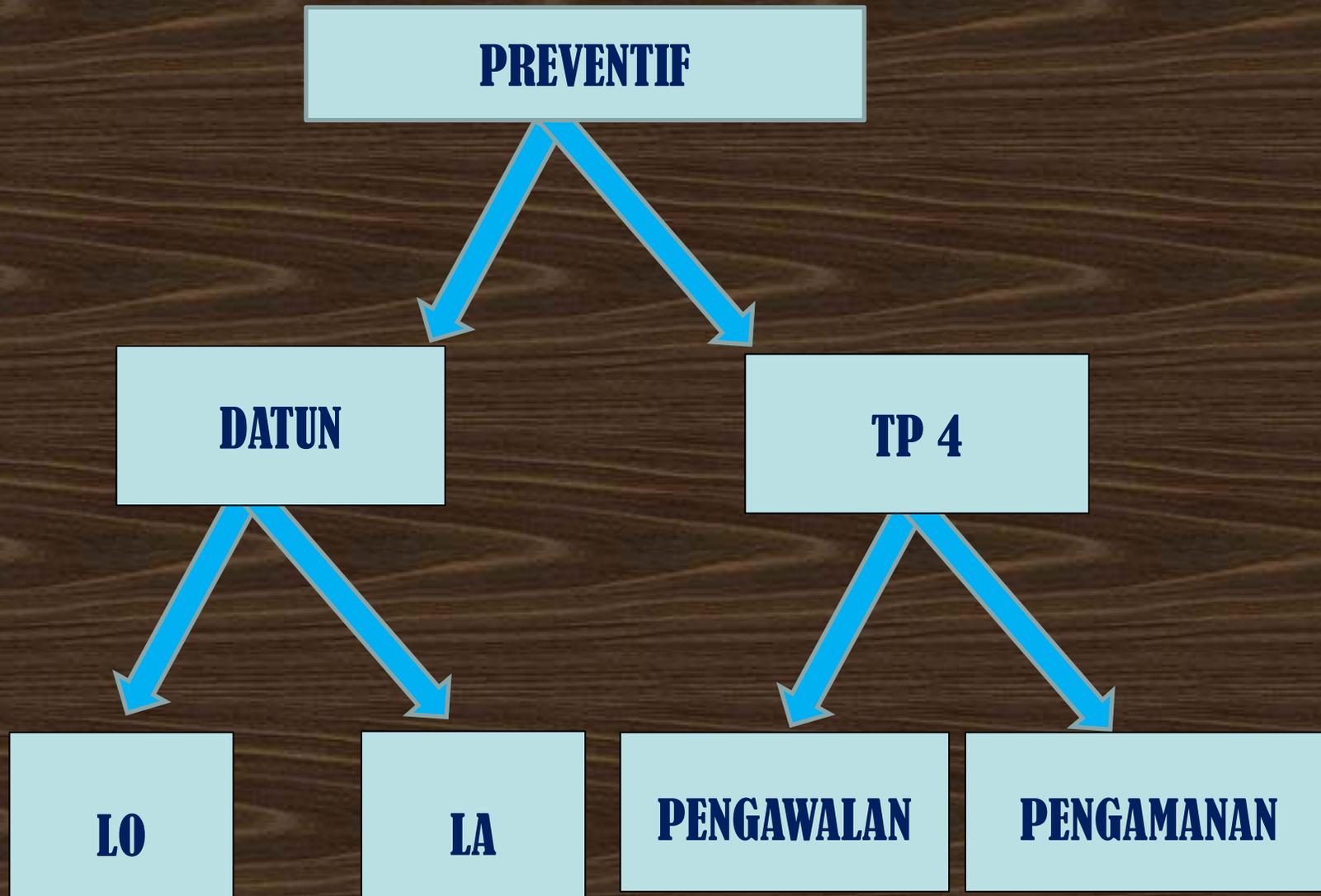
KEJAKSAAN
DIK:792 TUT:1481

POLRI : 689

KPK : DIK ...TUT ...



ANGGARAN YANG MINIM BUKAN KENDALA BAGI KEJAKSAAN
DALAM MELAKUKAN KINERJA YANG MAKSIMAL



WALPAM



TIDAK SEDANG DALAM
MASALAH DAN TIDAK SEDANG
PROSES LID/DIK/TUT APH



AHLI PENGADAAN
(LKPP)



AHLI TEKNIS
Sesuai Jenis Pekerjaan



AHLI KEUANGAN
(AUDITOR)

TRANSPARANSI

TUJUAN WALPAM

A. TEPAT WAKTU

B. TEPAT MUTU

C. TEPAT SASARAN

WARNING:

Jangan Ada **PENYALAHGUNAAN
WEWENANG, SUAP MENYUAP
dan/atau GRATIFIKASI**

PRE EMTIF

```
graph TD; A[PRE EMTIF] --> B[SEMINAR/ SOSIALISASI]; A --> C[JMS/D]
```

**SEMINAR/
SOSIALISASI**

JMS/D

PENUTUP

UNTUK MENGHINDARI PENYIMPANGAN YANG BERINDIKSI KORUPSI :

1. HINDARI KECURANGAN (FRAUD);
2. JANGAN SAMPAI ADA COI;
3. JANGAN ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN;
4. HINDARI KESALAHAN YANG DISENGAJA;
5. JANGAN SAMPAI ADA KICKBACK DAN BRIBERY.

Sekian
&
Terima Kasih



Ayo Kawal Uang Rakyat !

